NASKAH PUBLIKASI

PANDANGAN MUHAMMADIYAH TERHADAP "NEGARA PANCASILA" DALAM DINAMIKA KEBHINEKAAN INDONESIA PASKA MUKTAMAR TAHUN 2015

Muhammad Lukman Hakim
20140520039

SINOPSIS

Indonesia merupakan negara multikulturalisme atau plural state dengan menempatkan pancasila sebagai ideologi dalam merumuskan seluruh nilai pembangunan bangsa dan negara yang diharapkan dapat mewarisi budaya bangsa yang luhur dan sejahtera. Pancasila mengandung butir-butir nilai yang sangat mulia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial.

Kebinekaan, semboyan "Berbeda beda tetapi tetap satu" menjadi pemersatu berbagai perbedaan Agama, Ras, Suku dan budaya yang berbeda-beda dari sabang hingga merauke. Sehingga nantinya akan menghindarkan Indonesia dari berbagai ancaman yang merusak kedaulatan bangsa seperti Sparatisme, Makar, Terorisme dan penyakit bangsa yang dapat menggerogoti sendi-sendi bernegara nantinya.

Penelitian diskursif dengan deskriptif analitia ini dapat dinarasikan bahwa Muhammadiyah menjadi salah satu bagian penting dalam tubuh bangsa yang salah satunya berperan untuk ikut merawat dan melestarikan budaya bangsa. Dengan berbagai sumbangsih dalam bidang pemikiran seperti "Negara Pancasila" sebagai darul ahdi wasy-syahadah, Indonesia Berkemajuan, Islam Berkemajuan Muhammadiyah bukan hanya memerankan wacana ideologi tetapi juga mengisi pembangunan bangsa di berbagai area gerakannya sejak lebih dari seratus tahun lalu.

Kata Kunci: Pancasila, nasionalisme, Negara, Toleransi, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Keberadaan Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan Peran Muhammadiyah di dalamnya, sejak awal perumusan pancasila hingga kini Muhammadiyah selalu terlibat dalma agenda-agenda di dalamnya. Pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 di Makasar Muhammadiyah membentuk satu produk pemikiran yang dinamakan "Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wasy syahadah" yang dapat diartikan sebagai

Negara Kesepakatan dan Negara yang adil, Makmur dan sentosa.

Muhammadiyah Sebagai organisasi keagamaan islam dalam merawat kebhinekaan Indonesia tidak ingin terjerumus dalam salah satu poros ekstrim baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan maka menempatkan gerakanya sebagai pengusung wasatiyah/Moderat/Tengahan. Pilihan Muhammadiyah untuk menjadi gerakan wasatiyah dan Pandangannya terhadap Negara Pancasila amat dibutuhkan ditengah kekerasan dan tarik menarik kepentingan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Terlebih lagi Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai isu Radikalisme, terorisme dan Sparatisme dibuktikan dengan kemunculan Organisasi Sparatis yang ingin mendirikan negara sendiri dan Organisasi yang ingin mengantikan Ideologi Pancasila dengan Ideologi yang cenderung diskriminatif terhadap minoritas.

Angel Rabasa menegaslan dalam bukunya, *"Building Moderate Muslim Networks (2007)"*, bahwa berbagai elemen umat Islam, dalam konteks ini adalah Muhammadiyah, menjadi pengawal apa yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, yaitu: demokratisasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, menjunjung tinggi berbagai bentuk keragaman, penegakan hukum secara tak pandang bulu, melawan terorisme global dan pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan, memberantas radikalisme.

Dengan adanya sikap moderat dari Muhammadiyah dan pandangan Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila ini diharapakn akan mampu membawa aroma kedamaian dan ketenangan bagi bangsa Indonesia, terkhusus Muhammadiyah dengan banyaknya pengikut dan kader yang tersebar di Indonesia dapat menyemaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam pandangan Muhammadiyah terhadap Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi-Wasy Syahadah*, sehingga tidak perlu lagi ada isu makar di Republik Indonesia. Inilah Jihad Kebangsaan Muhammadiyah.

Ada dua alasan mengapa tema dalam penelitian ini sanagat penting untuk dikaji. Pertama, merespon banyakanya isu-isu terancamnya Kebinekaan dan toleransi umat beragama di indonesia. Kedua,

Berbicara tentang pancasila dikalangan masyarakat umum atau partai politik sudah menjadi hal yang biasadan juga telah banyak dikaji oleh berbagai peneliti. Sedangkan penelitian tentang sikap terhadap pancasila, kebhinekaan dan toleransi dalam konteks civil society (Muhammadiyah) Sejauh ini belum terlalu banyak.

PANCASILA SELARAS DENGAN NILAI KEISLAMAN

Islam sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas oleh bangsa ini tentu memiliki relasi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat disimak dari masing-masing sila yang terdapat pada Pancasila berikut ini:

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketuhanan adalah prinsip semua agama. Dan prinsip keesaan Tuhan merupakan inti ajaran Islam, yang dikenal dengan konsep tauhid. Dalam Islam tauhid harus diyakini secara kaffah (totalitas), sehingga tauhid tidak hanya berwujud pengakuan dan pernyataan saja. Akan tetapi, harus dibuktikan dengan tindakan nyata, seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, baik dalam konteks hubungan vertikal kepada Allah (ubudiyyah) maupun hubungan horisontal dengan sesama manusia dan semua makhluk (*hablun minan nas*).

Totalitas makna tauhid itulah kemudian dikenal dengan konsep *tauhid ar-rububiyyah, tauhid al uluhiyyah* ,dan *tauhid al-asma wa al-sifat*. *Tauhid Rububiyyah* adalah pengakuan, keyakinan dan pernyataan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur dan penjaga alam semesta ini. Sedangkan *tauhid al-Uluhiyyah* adalah keyakinan akan keesaan Allah dalam pelaksanaan ibadah, yakni hanya Allah yang berhak diibadahi dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah (dan Rasul-Nya) baik dengan ketentuan rinci, sehingga manusia tinggal melaksanakannya maupun dengan ketentuan garis besar yang memberi ruang

kreativitas manusia seperti ibadah dalam kegiatan sosial-budaya, sosial ekonomi, politik kenegaraan dan seterusnya, disertai dengan akhlak (etika) yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. (Syamsudin dalam MPK PPM, 2017: 162)

Melihat paparan di atas pengamalan sila pertama sejalan bahkan menjadi kokoh dengan pengamalan tauhid dalam ajaran Islam. Inilah, yang menjadi pertimbangan Ki Bagus Hadikusumo, ketika ada usulan yang kuat untuk menghapus 7 kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", mengusulkan kata pengganti dengan "Yang Maha Esa". Dalam pandangan beliau Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tauhid bagi umat Islam. (Endang Saifuddin, 1981: 41-44)

Sila kedua, *"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".* Prinsip kemanusiaan dengan keadilan dan keadaban adalah juga menjadi ajaran setiap agama yang diakui oleh negara Indonesia, termasuk Islam. Dalam ajaran Islam, prinsip ini merupakan manifestasi dan pengamalan dari ajaran tauhid. *Muwahhidun* (orang yang bertauhid) wajib memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan berkeadaban.

Sikap adil sangat ditekankan oleh ajaran Islam, dan sikap adil adalah dekat dengan ketaqwaan kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Maidah ayat 8

> *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Demikian juga konsep beradab (berkeadaban) dengan menegakkan etika dan akhlak yang mulia menjadi misi utama diutusnya Nabi Muhammad Saw dengan sabdanya, *"Sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."*

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia “ Ajaran Islam memerintahkan agar umat Islam menjalin persatuan dan kesatuan antar manusia dengan kepemimpinan dan organisasi yang kokoh dengan tujuan mengajak kepada kebaikan (al-khair), mendorong perbuatan yang makruf, yakni segala sesuatu yang membawa maslahat (kebaikan) bagi umat manusia dan mencegah kemungkaran, yakni segala yang membawa madharat (bahaya dan merugikan) bagi manusia seperti tindak kejahatan. Persatuan dan kesatuan dengan organisasi dan kepemimpinan yang kokoh itu dapat berbentuk negara, seperti negeri tercinta Indonesia.

Sila keempat, *“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan*” Prinsip yang ada pada sila keempat ini merupakan serapan dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepemimpinan yang adil, yang memperhatikan kemaslahatan rakyatnya dan di dalam menjalan roda kepemimpinan melalui musyawarah dengan mendengarkan berbagai pandangan untuk didapat pandangan yang terbaik bagi kehidupan bersama dengan kemufakatan. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dengan mengedepan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam sila-sila dalam Pancasila sejalan dengan ajaran agama. Bahkan pengamalan agama akan memperkokoh implementasi ideologi Pancasila.

Sila Kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Mengelola negara dengan prinsip keadilan yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat merupakan amanat setiap agama bagi para pemeluknya. Dalam Islam di ajarkan agar pemimpin negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan apabila menghukum mereka hendaklah dengan hukuman yang adil. (QS. Nisa: 58) Dalam kaidah fikih Islam dinyatakan “*al-ra’iyyatu manuthun bil maslahah*”, artinya kepemimpinan itu

mengikuti (memperhatikan) kemaslahatan rakyatnya. Berarti pula bahwa pemegang amanah kepemimpinan suatu negara wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat. (Majalahtabligh.com/2017/hubungan-pancasila-dengan-nilai-ajaran-islam)

WACANA PANCASILA DI MUHAMMADIYAH

Pandangan dan komitmen Muhammadiyah untuk memperkokoh Pancasila dan merawat Kebinekaan telah tertuang di dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, pada point terakhir telah dinyatakan bahwa:

> *"Muhammadiyah mengajak kepada segenap lapisan bangsa indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa Tanah Air yang mempunyai sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada pancasila dan undang-undang dasar 1945, untuk bersama sama menjadikan suatu negara adi dan makmur yang di ridhoi Allah Swt. Baldatun Thayyibatun Wa Robbun Ghafur.*

Dengan kata lain, Muhammadiyah tidak berhasrat membentuk negara lain selain Pancasila, termasuk negara formal Islam seperti Negara Khilafah Islam. Dalam hal ini posisi Muhammadiyah dalam memandang Pancasila telah dipertegas oleh keputusan Tanwir Muhammadiyah Bandung tahun 2012 yang menyatakan bahwa Muhammadiyah telah menerima bahkan ikut mendirikan NKRI sebagai konsensus nasional, yakni sebagai *"Darul Ahdi"* (Negara Perjanjian kolektif) dan *"Darus Syahadah"* (negara tempat Muhammadiyah mewujudkan pemikiran dan amaliah keislaman)

Bukti pandangan kebangsaan Muhammadiyah dapat di jumpai pada "Pernyataan Pikiran Abad ke Dua" yang menyatakan pemikiranya sebagai berikut.

> *"Secara dinamis dan transformasif dalam mewujudkan cita-cita nasional di tengah badai masalah dan tantangan zaman. Bahwa segala bentuk separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mencita-citakan bentuk negara yang lain sesungguhnya bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Demikian pula setiap bentuk penyelewengan dalam mengurus negara, korupsi, kolusi, nepotisme, penjualan aset-aset negara, pengrusakan sumberdaya alam dan*

lingkungan, penindasan terhadap rakyat, otoritanisme, pelanggaran hak asasi manusia, tunduk pada kekuasaan asing, serta berbagai tindakan yang merugikan hajat hidup bangsa dan negara merupakan penghianatan terhadap cita-cita kemerdekaan. Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki nilai-nilai keutamaan yang mengkristal menjadi modal sosial dan budaya"

Kosmopolitanisme merupakan kesadaran tentang kesatuan masyarakat seluruh dunia dan umat manusia yang melampaui sekat-sekat etnik, golongan, kebangsaan, dan agama. Kosmopolitanisme secara moral mengimplikasikan adanya rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggung jawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional. Muhammadiyah memiliki akar sejarah kosmopolitan yang cukup kuat.

Kosmopolitanisme Islam yang dikembangkan Muhammadiyah dapat menjadi jembatan bagi kepentingan pengembangan dialog Islam dan Barat serta dialog antar peradaban. Dalam perspektif baru konflik antar peradaban merupakan pandangan yang kadaluwarsa dan dapat menjadi pemicu benturan yang sesungguhnya. Tatanan dunia baru memerlukan dialog, kerjasama, aliansi, dan koeksistensi antar peradaban.

Bersamaan dengan itu Muhammadiyah memandang bahwa peradaban global dituntut untuk terus berdialog dengan kebudayaan-kebudayaan setempat agar peradaban umat manusia semesta tidak terjebak pada kolonisasi budaya sebagaimana pernah terjadi dalam sejarah kolonialisme masa lampau yang menyengserakan kehidupan bangsa-bangsa. Globalisasi dan multkulturalisme tidak membawa hegemoni kolonialisme baru yang membunuh potensi kebudayaan lokal, tetapi sebaliknya mau berdialog dan mampu memberikan ruang kebudayaan untuk tumbuhnya local genius (kecerdasan lokal) dan local wisdom (kearifan lokal) yang menjadi pilar penting bagi kelangsungan peradaban semesta.

Dalam "Pernyataan Pikiran Abad ke-Dua" tersebut sudah dapat dilihat bahwa Muhammadiyah sangat komitmen terhadap kerukunan, perdamaian dan anti terhadap sparatisme yang dapat menghancurkan NKRI, Pancasila dan Kebhinekaan. Wacana Pancasila di dalam Muhmamadiyah sudahlah final di dalam tingkatan pusat, yang artinya bahwa Muhammadiyah dengan segala daya dan upayanya tentu akan ikut merawat Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Dengan menjadikan *"Negara Pancasila sebagai darul ahdi wasy syahadah"* sebagai pandangan organisasi dan sebuah

rumusan penting dari sisi teologis politik merupakan langkah yang sangat bijaksana, untuk menghargai kesepakatan bersama yang telah di bangun oleh para pendiri bangsa indonesia yang ingin negara indonesia dibangun berdasarkan keberagaman dan saling toleransi satu sama lainya.

Tidak ada pertentangan terkait dengan pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia di dalam Struktural Muhammadiyah di tingkat pusat. Muhammadiyah sebagai satu gerakan dakwah yang senantiasa mengelorakan api semangat kebaikan melalui gerakan dakwah Islam Berkemajuan memandang bahwa setiap butir Pancasila sejalan dengan pikiran Islam dan tentunya pikiran ketuhanan merupakan kunci utama dalam setiap silanya.

Pertentangan terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara terjadi bukan di tingkat pusat namun terjadi pada tingkatan Pimpinan Wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Din Syamsudin dalam (MPK PPM, 2017:16) Ketika Tanwir Muhammadiyah terjadi dialok antara DS dengan salah satu Pimpinan Wilayah dan kader Muhammadiyah di padang yang meninginkan Indonesia dibangun berdasarkan “Syariat Islam” dan “Negara Khilafah”. Hal tersebut merupakan tindakan yang wajar di lontarkan oleh kader Muhammadiyah yang meski secara organisatoris Muhammadiyah tidak mendukung pendirian Negara Khilafah dan cenderung berfaham tengahan atau moderat. Namun, Muhammadiyah tidak dapat sepenuhnya mengontrol para kadernya untuk memiliki pemikiran yang sama dengan pemikiran organisasi.

PEDOMAN HIDUP ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH

Pedoman hidup islami warga Muha mmadiyah merupakan seperangkat pedoman untuk menjalani kehidupan dalam setiap aspek kehidupan termasuk diantaranya adalah kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi,

mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan seni dan budaya. PHIWM ini dilandaskan dan disusun berdasarkan Al- Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil Keputusan Majelis Tarjih.

Urgensi Penyusunan PHIWM ini karena warga Muhammadiyah memerlukan seperangkat panduan dan pengayaan dalam menjaani berbagai kegiatan sehari-hari yang selaras dengan kondisi dan situasi diantara lain:

1. Kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari Keyakinan Hidup Islami Dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis.
3. Perubahan-perubahan sosial-politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan Persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu.
4. Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis (berorientasi pada nilai-guna semata), materialistis (berorientasi pada kepentingan materi semata), dan hedonistis (berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi) yang menumbuhkan budaya inderawi (kebudayaan duniawi yang sekular) dalam kehidupan modern abad ke-20

yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru abad ke-21.

5. Penetrasi budaya (masuknya budaya asing secara meluas) dan multikulturalisme (kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintasi) yang dibawa oleh globalisasi (proses hubungan-hubungan sosialekonomi- politik-budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia) yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa.
6. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor (internal dan eksternal) yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri.

Muhammadiyah telah mengatur dalam PHIWM tentang pedoman dalam bernegara dan berbangsa yang isinya diantara lain adalah:

1. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsipprinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Beberapa pinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh menghianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma’ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempedomani Al-Quran dan Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia, menghormati kebebasan orang lain, menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak berhianat dan melakukan

kezaliman, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan dengan baik dan damai, tidak melakukan fasad dan kemunkaran, mementingkan ukhuwah Islamiyah, dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan ishlah.

3. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan ishlah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.
4. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, *fasad* (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri.
5. Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh.
6. Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

KONVERENSI INDONESIA BERKEMAJUAN

Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) berlangsung sejak Senin, 23 Mei 2016 dan ditutup secara resmi pada Selasa, 24 Mei 2016 bertempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). KNIB merupakan forum lintas kelompok, profesi, agama dan budaya yang dimaksudkan sebagai forum untuk

menghimpun gagasan , pengalaman dan idealisme untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Ketika KNIB dilangsungkan, indoneisa sedang mengalami beberapa krisis yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara, isu terorisme, LGBT, terorisme yang kemudian bisa kita simpulkan bahwa isu-isu tersebuat sebagai ibas dari nilai-nilai pancasila dan budaya bangsa yang kurang diresap secara baik. Banyak budaya dari luar yang kemudian di terima mentah-mentah, contohnya seperti LGBT sebagai hasil dari budaya barat yang terlalu liberal dan mengusung kebebasan tanpa batas. Maka sangat serasi jika Muhammadiyah mengadakan KNIB demi menjawab berbagai persolan bangsa dan merumuskan rekomendasi yang nantinya akan menjadikan kondisi Indonesia semakin membaik.

Selama dua hari tersebut, para narasumber yang hadir telah menyampaikan gagasan-gagasannya dalam mewujudkan visi Indonesia berkemajuan. Gagasan-gagasan tersebut menghasilkan pokok-pokok pikiran hasil KNIB diataranya:

1. Indonesia adalah rumah bersama yang dibangun di atas nilai-nilai dan cita-cita luhur 1945. Karena itu, segenap komponen bangsa memiliki kewajiban kolektif membangun keungulan bangsa, yang ditopang oleh kepemimpinan perubahan, budaya publik yang rasional-konstruktif, politik yang demokratis-berkeadaban yang efektif dan produktif, serta ekonomi yang berdaya saing tinggi, menuju Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat.
2. Bangsa Indonesia harus bekerja lebih keras, cerdas, kreatif, inovatif dan percaya diri untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial, politik, korupsi, kekerasan, moralitas, kriminalitas dan daya saing yang rendah.

3. Dalam bidang politik perlu didorong konsolidasi demokrasi yang berbasis nilai, etik, dan amanah untuk memperkuat good governance, clean goverment dan meritokrasi sehingga melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang kuat, melayani, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, partai politik, dan primordialisme agama dan budaya.
4. dalam bidang hukum dan pemerintahan diperlukan penguatan Indonesia sebagai negara hukum dimana seluruh sistem penyelenggaraan negara, penyelenggara negara dan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. KNIB memandang penting dilakukannya amandemen kelima UUD 1945 terutama yang berkait dengan Haluan Negara, kedudukan, susunan dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara dan sumber nilai dan etik yang memandu dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," jelas Dahlan Rais lagi.
5. Bangsa Indonesia memerlukan revolusi mental dan revolusi budaya sebagai prasyarat membangun bangsa yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, berkeadaban luhur yang dibangun melalui pendidikan yang bermutu dan berkeunggulan.
6. Bangsa Indonesia memerlukan tatanan kehidupan sosial dan politik yang lebih kuat berlandaskan spirit persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan visi bersama untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat.

Dalam KNIB dideklarasikan pembentukan Perkumpulan Pergerakan Indonesia Maju (PIM) pada april 2016 dimana Din Syamsudin ditetapkan sebagai

ketuanya. PIM ditujukan untuk fokus untuk menggalang potensi kemajemukan bangsa yang bersifat lintas agama, suku, profesi, gender sekalipun untuk dijadikan kekuatan. Implementasi nyata dari fokus PIM tersebut diwujudkan dari tingkat tataran atas konseptual hingga tingkat bawah yang melibatkan semua pihak mulai pemerintah hingga rakyat di pedesaan. Semua visi itu terangkrum dalam dasa cita budaya berkemajuan yang Din sampaikan pada pidato kebangsaan bertajuk "Indonesia Maju".

Poin-poin penting yang tercantum dalam dasa cita tersebut antara lain maju dari kebiasaan mementingkan diri sendiri, maju dari tirani, maju dari sifat feodalisme dan primordialisme, maju dari budaya nepotisme, maju dari kecendurungan menganiaya diri sendiri, maju dari budaya kekerasan, maju dari kebiasaan korupsi, maju dari ketergantungan negara lain, maju dari rasa rendah diri, dan maju dari kecintaan pada dunia. Din menyatakan hal terpenting dalam mewujudkan Indonesia maju yakni adanya budaya berkemajuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Budaya-budaya itulah yang terangkum dalam dasa cita budaya berkemajuan. PIM ini tidak sama sekali ditujukan sebagai partai politik pada kemudian hari, karena sedari awal dibentuknya PIM adalah untuk terlibat langsung dalam aksi yang bersifat kultural (umy.ac.id, 23 mei 2016)

PIM sebagai organisasi masyarakat berhimpit dengan visi Muhammadiyah untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan, Din Syamsudin selaku ketrua PIM menjelaskan dalam KNIB bahwa:

> *"Konvensi ini sangat penting karena Muhammadiyah sudah menetapkan satu visi keindonesiaan yang disebut dengan visi Indonesia berkemajuan. Saya kira visi PIM berhimpit dengan visi Muhammadiyah ini, secara esensi cita-cita nasional Indonesia yang oleh Muhammadiyah diberi tafsir kontekstual. Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Konvensi ini ingin menawarkan kepada bangsa sebuah konsensus Indonesia yang kita cita-citakan dan usaha kita bersama untuk merealisasikannya. Ini tentu sebuah proses panjang yang*

melibatkan elemen-elemen lain".

WACANA KEBHINEKAA DAN TOLERANSI

Muhammadiyah dalam rentang usianya yang sudah lebih dari satu abad telah merasakan dinamika kehidupan berbangsa. Kiprah membangun dan mengisi ruang kehidupan kebangsaan yang berlandaskan bingkai kebersamaan atas prinsip toleransi dan kebhinekaan dari Muhammadiyah, tidak perlu diragukan. Maka kemudian satu langkah yang sangat bijaksana bagi muhammadiyah untuk memberi tema "Merekat Kebersamaan" dalam acara tahunanya yang disebut Milad Muhammadiyah pada usianya yang 105 Tahun.

Tema ini bermakna Indonesia yang lahir dari hasil kesepakatan pendahulu, harus terus dipelihara agar bisa menjadi negara yang bersatu. Dikutip oleh (Republika.com/17/11/16: 1) Agung Danarto mengatakan bahwa:

> *"Tidak mudah merajut dan merekatkan bangunan kebangsaan. Mengingat, bangsa ini merupakan bangsa yang sangat besar, dan besar itu tidak sekadar luas wilayah. "Tapi besar karena luasnya keberagaman dan latar belakang sosialnya," Artinya, harus ada upaya aktif dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bersatu, agar upaya itu bukan hanya berujung kepada slogan, melainkan realitas."*

Maka dari itu, Sebagai salah satu elemen masyarakat Muhammadiyah harus membina rekatama kebhinekaan melalui Pancasila yang saat ini sedang memudar di tengah masyarakat karena konflik sosial.

Indonesia adalah contoh konkret untuk kemajemukan suatu bangsa, dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai wadah pertarungan untuk berbagai macam ideologi yang mewakili kemajemukan tersebut. Dengan berbagai ideologi yang ada maka kemudian peran Pancasila disini dapat dijadikan sebagai perantara yang mampu merangkul kebersamaan. Kondisi kemajemukan Indonesia sama halnya ketika madinah pada zaman Rasulullah yang dimana saat itu kota Madinah tidak hanya dihuni oleh pemeluk Islam, namun

juga oleh Yahudi dan Nasrani. Posisi Pancasila di sini serupa dengan Perjanjian Madinah yang memiliki karakteristik berupa keadilan yang menyeluruh bagi seluruh pihak yang terikat olehnya.

Dalam permasalahan hidup sehari permasalahan yang kerap dibahas dalam koridor Kebhinekaan adalah persolan fenomena Pluralitas, Pluralitas warna kulit, Pluralitas Etnik, Pluralitas Agama, Pluralitas bahasa, Pluralitas latar belakang pendidikan. Isu seputar Kebhinekaan bukanlah hal yang baru, menurut Amin Abdullah (2000: 56) bahwa Membahas persoalan Kebhinekaan dan Pluralitas ibarat seperti:

> *"to put a new wine in the old bottle" (memasukkan minuman anggur yang baru kedalam botol yang lama). Botolnya tetap itu-itu saja, dalam arti bahwa isu pluralitas adalah setua usia manusia dan selamanya akan tetap ada. Hanya saja yang membedakan adalah cara untuk membuat anggur yang bisa berubah-rubah sesuai dengan perkembangan teknologi maupun minuman yang ada".*

Dalam logika *"to put a new wine in the old bottle"* maka tidak hayal terjadinya pergeseran arus Pluralitas yang tadinya alami bergeser dengan Pluralitas yang diwarnai dengan persoalan ideologis. Dalam praktik kehidupan sehari-hari sebelum dicampuri dengan persoalan Ideologis, Ekonomi, Sosial, Politik dan bahkan agama, umat manusia dapat menjalani kehidupan pluralistik setiap hari dengan wajar dan biasa saja tanpa perlu mempertimbangkan sisi benar ataupun salah.

Namun, ketika kemudian manusia bergerak dalam berbagai kepentingan baik dalam koridor organisasi, politik, agama, keamanan dan lain sebagainya mulai mengangkat isu kebhinekaan ke arah kesadaran mereka dan kemudian menjadikannya *"ultimate concern"* maka persoalan pluralitas agama, toleransi dan Kebhinekaan yang alami dan waja-wajar saja berubah menjadi sangat problematik. Dengan berbagai sudut pandang, tolak ukur dan standar dari masing-masing pengusung wacana mulai diperlihatkan, meskipun Sudut pandang yang diambil

adalah berdasarkan logika dan hegemoninya sendiri-sendiri (Abdullah, 2000: 56).

Dadang Kahmad dalam (Suara Muhammadiyah, 05/103:18) menyoroti seputar kemajemmukan dan kebhinekaan. Kemajemukan menurutnya merupakan sebuah keniscayaan kehidupan manusia, *"kalau kita melihat kepada dasar pijakan teologis dari agama-agama, maka akan kita dapatkan ajaran bahwa kebhinekaan kultur itu merupakan sesuatu yang ditakdirkandari tuhan."* Contohnya dalam agama islam yang dengan tegas mengemukakan bahwa kemajemukan merupakan sunatullah, sebuah ketentuan tuhan yang tidak dapat terbantahkan lagi.

Dalam suart al hujurat ayat 13 telah dinyatakan.

> *"Hai Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu (manusia) dari seorang laki-laki da seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi allah ialah yang paling mulia diantara kamu di sisi allah ialah yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungghnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal."*

Lanjut DK bahwa Kebenaran kitab suci al quran adalah sebuah postulasi yang akurat. Sejalan dengan fakta bahwa manusia lebih senang hidup bersama, hidup berkoloni, berkabilah dan berbangsa-bangsa daripada hidup sendiri dan mengandalkan dirinya sendiri hal demikian sangat di dukung oleh al quran. Maka kemudian pristiwa untuk hidup bermasyarakat merupakan sunatulah atau hukum alam.

Jika kemudian ada beberapa masyarakat yang membentuk kelompok atau kabilah tentunya memiliki tujuan yang sangat mulia, tujuan agar salig mengenal satu sama lain, untuk betaaruf, dengan kedekatan komunikasi dan kenal mengenal ini menurut dadang akan menghindarkan masyarakat yang terbagi dalam beberapa kelompok ini akan terhindar dari konflik dan perpecahan. (Suara Muhammadiyah, Edisi 5/Th.ke-103: 18).

Bukan hanya perbedaan antar agama, adanya perbedaan di dalam agama itu sendiri merupakan sunatullah, maka tidak hayal banyak kelompok-kelompok dan Harokah tercipta untuk kepentingan agamaya, tentunya dengan ciri khas yang ditawarkan masing masing kabilah atau kelompok ambil saja contoh nuansa Isalam yang dibawa Muhammadiyah berbedan dengan NU, FPI, HTI SI dan lain sebagainya. Perbedaan lintas kabilah dalam islam ini merupakan masalah muamallah yang di dalam islam sangat diperbolehkan. Muhammad Roem, seperti yang dikutip oleh mengatakan bahwa "*Islam dalam satu perspektum sangat tegas sekali masalah Akidah*," misalkan kita menganggap ada nabi terakhir selain nabi muhammad, maka mutlak sesat, kita meninggalkan sholat sudah pasti dosa. *"Tapi di spektum lain Islam sangat luwes masalah Muamalah"* seperti sholat subuh hendak mengunakan Khunut atau tidak, dan masalah pandangan keislaman merupakan masalah muamallah entah islam berkemajuan maupun islam nusantara dapat digolongkan sebagai muamallah.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sekali, baik berupa SDM atau SDA maupun sistem negara yang modern tiga modal tersebut dapat digunakan untuk merekat kebersamaan, Selain itu Indonesia adalah negara yang berpancasila dan beragama dalam arti hal-hal yang menyangkut tugas kenegaraan tidak dapat dipisahkan dari efek Agama, tidak terbatas pada satu agama saja. Namun, nampaknya ada problematika berbau politis yang menjalar dalam tubuh berpancasila ini yang terjadi akibat perpolitikan nasional, yakni ada nuansa saling membelah antara kanan-kiri, NKRI-anti NKRI, Toleran-Intoleran (Matan, Edisi 137, Desember 2017: 13)

Namun, Akhir-akhir ini menguat isu tentang intoleransi dan radikalisme yang menurut beberapa pihak meningkat dari tahun ke tahun. Berkembang juga isu seputar gerakan anti-Pancasila, anti-

Kebhinekaan, anti-NKRI, polarisasi yang membelah bangsa, dan bentuk ancaman lain terhadap ke-Indonesia-an. Isu tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme secara khusus sampai batas tertentu dikaitkan dengan agama khususnya umat Islam.

Namun perlu juga dicermati dengan seksama. Bahwa intoleransi, radikalisme, dan segala bentuk ancaman terhadap ke-Indonesia-an seyogyanya dicandra secara objektif dan komprehensif agar tidak bersifat parsial, tendensius, dan salah pandang. Perlu rekonstruksi konsep, pemikiran, dan parameter yang dapat didialogkan dan dirumuskan secara kolektif tentang fenomena intoleransi, radikalisme, dan segala bentuk anti-kebhunekaan agar terhindar dari tendensi yang sepihak, hitam-putih, dan hanya ditujukan pada satu aspek dan golongan.

Haedar Nashir menyampaikan dalam sambutanya di Resepsi Milad Muhammadiyah 105 bahwa *"Perlu disadari bahwa betapa kompleksnya hidup dalam suatu bangsa yang bhineka dan mengelola kebhinekaan. Masyarakat majemuk (plural society) memiliki sifat non-komplementer, satu sama lain pada dasarnya sulit bersatu,* Ketika bangsa Indonesia yang bhineka itu bersatu, menurut para ahli hal itu karena ada nilai perekat yang disepakati bersama, yakni Pancasila. Manakala nilai perekat itu longgar dan tidak menjadi rujukan yang aktual maka luruhlah kebersamaan, sehingga sekarang Pancasila ditransformasikan kembali untuk menjadi dasar filosofis berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, menurut antropolog Prof Koentjaraningrat, pada pembentukan integrarsi nasional umat Islam selaku mayoritas memiliki peran dalam integrasi sosial di tubuh bangsa ini. Karena itu sesungguhnya agama dapat menjadi kekuatan kohesi nasional, di samping boleh jadi karena bias pemahaman dan perilaku sebagian pemeluknya sampai batas tertentu sentimen keagamaan dapat menjadi faktor

konflik. Tetapi faktor lain pun seperti politik, ekonomi, etnik, dan kedaerahan di tangan orang-orangnya yang memiliki bias-paham dan bias-perilaku dapat pula menjadi faktor disintegrasi sosial, di samping menjadi kekuatan yang menyatukan.

Sementara itu sebagai konsekuensi dari reformasi dan pilihan demokratisasi yang serbaterbuka di tengah arus deras kekuatan asing dan globalisasi yang masuk ke seluruh ranah kehidupan kebangsaan, kini terjadi proses liberalisasi kehidupan politik, ekonomi, dan budaya yang membawa dampak sangat kompleks dalam kehidupan kebangsaan. Proses liberalisasi ini meluruhkan nilai keindonesiaan yang berbasis pada agama, Pancasila, dan kebudayaan yang hidup di tubuh bangsa ini. Orientasi hidup yang egoistik, hedonis, materialistis, transaksional, rakus, dan oportunistik telah mengoyak kebersamaan dan sendi-sendi kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan.

Rusaknya kebersamaan juga dapat terjadi karena kesenjangan ekonomi yang semakin ekstrim. Jika satu persen orang Indonesia dibiarkan tetap menguasai 55 proses kekayaan nasional, maka selain merusak kebersamaan tetapi lebih jauh akan menjadi api dalam sekam yang dapat bermuara pada disintegrasi nasional yang masif. Negata harus berani menegakkan keadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial ini. Jangan biarkan segelintir orang dengan tangan raksasa, kerakusan, kekuatan uang, dan pengaruhnya di struktur kekuasaan menguasai Indonesia baik terbuka maupun terselubung jika negeri ini ingin mewujudkan Pancasila dan cita-cita nasional dalam kebersamaan.

Kesenjangan sosial dan keserakahan sekelompok kecil pihak sama gawatnya dengan radikalisme dan terorisme serta ancaman ideologis lainnya, malah mungkin lebih berbahanya. Pemerintah dan kekuatan politik pun perlu makin waspada akan segala ancaman yang

berjangka panjang ini. Kaum beriman tentu ingat akan peringatan Allah SWT, bahwa kerusakan di muka bumi terjadi karena ulah-tangan manusia, serta hancurnya suatu negeri karena ada sosok-sosok "al-mutrafun" yang selalu berbuat anarki, rakus, dan wewenang-wenang.

Karenanya diperlukan ikhtiar semua pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan ini secara jernih, objektif, dan komprehensif dengan meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Membangun kebersamaan dalam masyarakat majemuk dan sarat masalah krusial seperti diuraikan itu sungguh merupakan jalan terjal sekaligus mulia yang memerlukan keberanian dan jihad para pemimpin negeri yang bebas dari kepentingan dan segala bentuk penyanderaan diri. "Sebuah negara terbentuk bukan semata karena kekuasaan, tetapi bersatunya secara integral seluruh kekuatan masyarakat dalam entitas bangsa", ujar filsuf ternama Spinoza. Karena itu semua pihak, baik pemerintah dan kekuatan politik maupun seluruh komponen bangsa dituntut komitmennya yang kuat untuk merekatkan kebersamaan ketika terdapat retak di tubuh bangsa ini.

Maka dari itu, penulis akan mencoba menguraikan peran muhammadiyah sebagai organisasi besar yang memiliki banyak pengikut di indonesia yang tentunya memiliki peran sentral dalam membendung arus radikalisme dan intoleransi. Dalam Analisis ini akan dilihat pembagian keberagaman yang dimiliki indonesia dan tantangan muhammadiyah terhadap kebhiekaan di Indonesia.

Setidaknya ada dua permasalahan kebhinekaan di indonesia dan peran muhammadiyah untuk merawat kebhinekaan dan toleransi bukan hanya toleransi umat beragama tetapi toleransi di dalam internal umat islam sendiri. Pertama, Kebhinekaan atau keberagaman terhadap agama yang berbeda-beda dan keberagaman di dalam internal umat islam.

VARIAN IDEOLOGI KADER MUHAMMADIYAH

Secara Organisatoris Muhammadiyah tidaklah menentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, Namun mengingat Muhammadiyah memiliki kader dengan berbagai rupa varian ideologi, konsekuensinya adalah sikap yang dipilih oleh kader Muhammadiyah kadang kala bertentangan dengan pandangan Organisasi. Pertentangan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia masih kerap dipermasalahkan oleh warga Muhammadiyah di tingkatan bawah. Seperti yang terjadi dalam tulisan yang telah dijelaskan diatas

Keberagaman pandangan warga Muhammadiyah ini dapat dicermati melalui Penelitian yang dilakukan bintaro. Dapat disimpulkan bahwa Setidaknya sikap warga muhammadiyah dalam memandang pluralisme. *Pertama*; varian warga muhammadiyah yang stuju dan menerima pluralitas agama dengan argumentasi yang di gunakan adalah dalam memahami pluralisme agama harus di bedakandengn pluralitas dan *diversitas* agama, sebab pluralisme keagaamaan lebih sekedar pengakuan secara pasif terhadap keragamaan keyakinan dan agama lain.

Kedua; kaum muda Muhammadiyah yang menolak tegas wacana Pluralisme agama, argumentasi yang di gunakan bahwa pluralisme agama adalah paham yang mengajarkan semua agama benar dan ini bertentang dengan keyakinan bahwa agama yang paling benar di sisi Allah hanyalah Islam bukan yang lain. Artinya dari dua studi di atas, dapat di pahami bahwa antara "teks idealiatas" (teks ideologi Muhammadiyah) dengan realitas prilaku sosial keberagamaan Muhammadiyah itu berbeda, sangat variatif.

Sholihul Huda, Menulis sebuah penelitian yang berjudu, "Varian Ideologi Keberagaman di Muhammadiyah dari Moderat hingga Radikal" (2016) Yang menurutnya ada 5 sebab latar belakang model varian ideologi di Muhammadiyah

dan penyebabnya kenapa bisa terjadi. *Pertama*, Muhammadiyah adalah teks realitas sosial keagamaan muhammadiyah sangat dinamis yang berarti akan terus mengalami dialektika pergerakan dan perubahan akan dpat dirubah dan disesuaikan smenurut perkembangan zaman biar tidak dianggap *stagnan*, jumud "tradisional". Apalagi dengan mengusung gerakan pembaharuan Islam (*Tajdid*), maka semakin mempengaruhi alam berfikir warga Muhammadiyah untuk di tuntut berfikir dan berprilaku modern, dan ini membutuhkan pembacaan ulang terus-menerus terhadap Muhammadiyah.

Kedua, posisi struktur sosio-kultur pengikut Muhammadiyah bervariasi. Pada awal berdirinya Muhammadiyah banyak di *back up* oleh mayoritas pedagang dan priyayi (abdi dalem Keraton Ngayogyokarto), kemudian bergeser pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama guru dan dosen yang mayoritas tinggal diperkotaan, sehingga Muhammadiyah lebih cepat berkembang di Perkotaan daripada di Pedesaan. Perkembangan selanjutnya, dakwah Muhammadiyah mulai menyasar masyarakat pedesaan dan beragam komunitas sosial mulai Pekerja Seks Komersial (PSK), Petani, Buruh, Nelayan, Blogger, Eksekutif Muda, Pengusaha Artis dan sebagainya.[4] Kondisi ini tentu berdampak bagi Muhammadiyah, mereka mengkonstruksi Muhammadiyah sesuai "alam berfikir" dan latar sosio-kulturnya, sehingga punya warna tersendiri di kalangan Muhammadiyah.

Ketiga, ragam pemahaman terhadap pemikiran ideal Kiai Ahmad Dahlan yang di kaitkan dengan realitas sosial. Muhammadiyah adalah wujud dari cita-cita ideal Kiai Ahmad Dahlan dalam membangun masyarakat Islam dengan di landasi pada spirit nilai-nilai Islam, "*welas asih*" dan reformasi (*tajdid*).[5] Cita-cita ideal inilah yang terus di konstruksi dengan beragam metodologi dan kepentingan untuk menemukan konstruksi se ideal mungkin dengan cita-cita Kiai Ahmad Dahlan dalam menjawab

problematika masyarakat. Karena beragama metodologi dan kepentingan, maka secara otomatis hasil konstruksi pemahaman tersebut juga bervariatif. Ragam ini tentu mempengaruhi konstruksi ideal terhadap Muhammadiyah

Keempat, paradigma dan metodologi keilmuan yang berbeda dalam memahami realitas sosial Muhammadiyah dengan problem masyarakat kontemporer. Warga Muhammadiyah beragam latar pendidikan, mulai tidak sekolah sampai Profesor. Polarisasi latar ini berdampak pada paradigma dan metodologi yang digunakan dalam memahami dan menyikapi persoalan di Muhammadiyah. Fenomena ini dapat di amati ada sebagian warga Muhammadiyah yang masih berkutat pada pembahasan hukum Qunut Sholat Shubuh, TBC, Tahlilan, Ziarah Kubur, *Tingkepan*, dan sebagaianya, namun ada juga yang sudah membahas *internasionalisasi* Muhammadiyah di aras global. Potret di atas menggambarkan bahwa struktur sosio-kultur warga Muhammadiyah tidak tunggal. Kondisi ini secara alamiah mempengaruhi polarisasi pemahaman dan sikap keberagamaan di internal Muhammadiyah. Artinya, walaupun secara konsep, rumusan ide dan strategi perjuangan (ideologi) di sepakati bersama dan tunggal melalui keputusan organisasi, tetapi dalam proses pemahaman terhadap ideologi bervariatif, sehingga menimbulkan sikap sosialkeberagamaan yang bervariatif.

Semisal ada ber-Muhammadiyah dengan paham ideologi Islam Moderat, Islam Puritan, Islam Liberal bahkan Islam Radikal “garis keras”. Polarisasi paham ideologi tersebut juga berpengaruh terhadap pemahaman dan penyikapan *diskursus* pemikiran Islam di kalangan Muhammadiyah. Wacana hangat yang jadi perdebatan di kalangan Muhammadiyah, *pertama;* penyikapan terhadap isu-isu pemikiran Islam kontemporer, seperti masalah Liberalisme, Sekulerisme, Pluralisme, Geder, HAM, Demokrasi,

toleransi antar non-Muslim dan sebagainya. *Kedua*, penyikapan terhadap relasi Islam dan politik, persoalan ini hingga saat ini masih menjadi perdebatan hangat terutama berkaitan dengan konsep Negara Islam (*dawlah Islamiyah*), Khilafah Islamiyah,Formalisasi Syariat Islam, dan sebagainya.

Ketiga; penyikapan terhadap idealisasi model dakwah *amar ma"ruf nahi mungkar* di masyarakat, persoalan ini juga menjadi pewacanaan di kalangan aktivis Muhammadiyah, terutama berkaitan dengan aktualisasi dakwah Muhammadiyah di tengah kemungkaran sosial dan problem akibat modernitas dan westernisasi Wacana di atas dipahami dan di konstruksi oleh warga Muhammadiyah secara beragam. Konstruksi itu sangat di pengaruhi oleh konstruksi ideologinya. Pada kajian ini dapat dipotret varian ideologi keberagaman Muhammadiyah dari prespektif pemahaman ideologinya.

Pertama; varian ideologi keberagamaan Moderat. Varian ini memahami ideologi Muhammadiyah secara terbuka (*inklusif*). Maksudnya, keberdaan Muhammadiyah di masyarakat tidaklah sendiri, tetapi berhimpit dengan gerakan sosial keagamaan yang lain (NU, PERSIS, AL-Irsyad, Syiah, FPI, HTI, dll), sehingga harus saling menghormati dan toleran. Kelompok ini terbuka dengan perubahan baru, namun tetap memperhatikan tradisi puritan Muhammadiyah. Kelompok ini mendasarkan pemahamannya pada kaidah Ushul al-Fiqh "*alMukhafadhatu „ala qadhimi al-ashlah wal akhdzu ala jadidi al-ashlah*" (Menjaga yang lama yang baik dan mmengambil yang baru yang baik). Varian ini dapat menerima wacana Liberalisme, Sekulerisme, Pluralisme, toleransi namun tidak harus diikuti semua, apabila ada yang baik maka dapat di adopsi dengan tradisi Muhammadiyah.

Kedua, varian ideologi keberagamaan puritan. Varian ini memahami ideologi Muhammadiyah secara tertutup (*ekslusif*), artinya ideologi

Muhammadiyah sudah final dan terbaik kebenaranya daripada ideologi keagamaan yang lain. Ideologi Muhammadiyah adalah ideologi yang berdasarkan al-Qur'an Hadits, dan berIslam itu harus "murni" berdasarkan pedoman al-qur'anHadits dan hasil putusan Tarjih Muhammadiyah. Putusan Tarjih Muhammadiyah dipahami sudah sesuai dengan al-Qur'an-Hadits, tidak boleh dicampur dengan tradisi Tahayul, Bid'ah dan Khurufat (TBC). Varian ini paling *fundamentalis* dan konsisiten dalam mempraktekan Islam murni ala Majelis Tarjih, atau pinjam istilah Munir Mulkhan adalah Kelompok "Muhammadiyah Al-Ikhlas"[7] atau disebut juga Muhammadiyah "*Tus*".[8]

Ketiga; varian ideologi keberagamaan Liberal. Varian ini memahami bahwa ideologi Muhammadiyah harus di dekonstruksi ulang karena, di anggap kurang relevan untuk dapat menjawab problematika kontemporer. Konsep-konsep ideologi Muhammadiyah di anggap produk masa lalu, sehingga Muhammadiyah dianggap stagnan, ketinggalan, *jumud,* gagap dan sebagainya. Oleh karena itu jika Muhammadiyah ingin maju "modern", maka di perlukan dekonstruksi ulang ideologi dengan mengadopsi penuh tradisi Barat. Semisal pemikiran tentang Liberalisme, Sekulerisme, Pluralisme, HAM, demokrasi dan sebagainya. Varian ini melakukan dekonstruksi ideologi Muhammadiyah dengan menggunakan perangkat keilmuan kontemporer, semisal filsafat, sejarah, sosiologi, antropologi, psyikologi, politik dan sebagainya.

Keempat; varian ideologi keberagamaan radikal "garis keras". Kemunculan varian ini dilandasi pada kajian posisi Muhammadiyah dengan penegakkan Syariat Islam (*Khilafah Islamiyah)* di Indonesia serta wacana aktualisasi ideologi dakwah *amar ma"aruf nahi mungkar* Muhammadiyah di masyarakat. *Pertama;* pada wacana penegakkan Syariat Islam Indonesia,

varian

ini beranggapan ideologi Muhammadiyah tidak tegas dalam memperjuangkan penegakkan Syariat Islam di Indonesia "abu-abu" tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam lainya seperti Hizbut at-Tahrir (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), KISDI, Komite Penerapan Syariat Islam (KPSI) dan

sebagainya.

Kedua; pada wacana aktualisasi dakwah *amar ma"ruf nahi mungkar* di masyarakat, varian ini beranggapan ideologi dakwah Muhammadiyah hanya berkutat pada dakwah "*amar ma"ruf*" amal baik, namun tidak tegas dan jelas pada

aktulaisasi dakwah "*nahi mungkar*" terkesan gagap dan membiarkan, tidak seperti

yang di lakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) yang lebih tegas dan keras dalam dakwah *"nahi mungkar"* Konstruksi pemahaman ideologi tersebut menjadikan mereka mengambil langkah dengan mengadopsi ideologi kelompok Islam radikal, bahkan terlibat juga di dalamnya. Sehingga, pola ini kemudian mempengaruhi sikap keberagamaan mereka di Muhammadiyah cenderung radikal dan keras mirip "gaya" kelompok Islam radikal yang dianggap lebih Islami dari pada Muhammadiyah

KEBERAGAMAN ANTAR UMAT BERAGAMA

Muhammadiyah dalam memandang Isu kebhinekaan dan toleransi antara umat bergama cenderung mengunakan cara-cara yang kreatif sehingga dapat menumbuhkan harmonisitas umat bergama daripada cara kontfrontatif yang cenderung akan menimbulkan kerusuhan antara umat beragama, Hal ini dapat dilihat dari penelitian Alwi Syihab tentang Muhammadiyah yang menurutnya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh

muhammadiyah dalam dunia pendidikan, kesehatan, sosial merupakan satu langkah bijaksana untuk menjaga keharmonisan anantara umat beragama.

Dengan cara pendekatan yang lebih kompetitif daripada pendekatan konfrontatif dalam penyebaran misi dakwah amar makruf nahi munkarnya Muhammadiyah akan lebih menumbuhkan suasana harmonis. Dalam satu sisi usaha untuk berdakwah yang ketika Zaman Awal Muhammadiayh didirikan oleh Ahmad dahlan salah satu poinya adalah membendung arus kristenisasi dan sisi lain menjaga Kebhinekaan dan kerukunan antara umat beragama teruslah berjalan.

Alwi Syihab menggambarkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan isllam amar makruf nahi munkar sangat memiliki kepudilian besar terhadap penetrasi penyebaran kristenisasi yang sangat masif, sehingga dalam rangka menyaingi masyifitas kristenisasi tersebut Muhammadiyah memilih jalan kompetitif, yaitu mencoba menyantuni rakyat indonesiadalam level gras root sehingga menyentuh kebutuhan orang banyak, yang dilakukan dengan mendirikan berbagai lembaga.pendidikan dari tingkat kanak-kanak hinga perguruan tinggi sebagai bentuk amal usaha Muhammadiyah.

Prinsip pokok mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap kebhinekaan dapat dilihat bahwa Muhammadiyah meyakini bahwasanya kehidupan bermasyarakat merupakan fitrah dari Tuhan. Hal ini sesuai dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada pokok pikiran ke dua “Hidup manusia itu bermasyarakat”. Pokok pikiran tersebut dirumus sebagai berikut: “Hidup bermasyarakat itu sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas hidup manusia di dunia ini.” Realitas masyarakat sangatlah pluralistik, terdapat bermacammacam suku, ras, dan golongan. Oleh karena itu, jika masyarakat adalah keniscayaan, maka pluralitas masyarakat yang terdapat di dalamnya merupakan keniscayaan juga. Muhammadiyah meyakini bahwasanya

pluralitas adalah suatu keniscayaan yang ada dan sudah.

KEBHINEKAAN DALAM AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

Kemudian Komitmen terhadap Kebhinekaan Yang telah dilakukan muhammadiyah adalah denganmen dirikan lembaga pendidikan yang tidak hanya diperuntukkan untuk siswa maupun Mahasiswa muslim saja, namun mahasiswa non muslim berhak atas pendidikan yang sama dengan yang lainya di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Kebhinekaan dan toleransi antar umat bergama dapat dilihat pada Universitas Muhammadiyah Kupang yang hampir 75% Mahasiswanya beragama selain islam. Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuat sebuah penelitian yang berjudul *"Salib Terang di Bawah Sinar Sang Surya: Politik Rekognisi Keragaman Agama, Budaya dan Nilai Kepribadian Melalui Pendidikan Multikultural*. Dengan menjadikan Universitas Muhammadiyah Kupang sebagai objek penelitian maka ditemui hasil bahwa Mayoritas Mahasiswa UMP memilih berkuliah di UMP Karena citra Muhammadiyah yang sangat toleran dan selama tahun ke tahun budaya toleransi tersebut tetap terjaga.

Selain itu, dengan penuh kesadaran, sebagai buah komitmen Muhammadiyah dalam Toleransi dan Kebhinekaan, Muhammdiyah melalui majelis pendidikan tinggi tanggal 3-4 November 2017 merancang AIK (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan) khusus bagi non Muslim yang menempuh pendidikan di lembaga Muhammadiyah. Karena AIK yang sering diterima oleh mahasiswa non muslim sama dengan AIK yang diberikan pada mahasiswa di PTM pada umumnya, yaitu AIK 1 (Kemanusiaan dan Keimanan), AIK 2 (Ibadah, Akhlak dab Muamallah), AIK 3 (Islam dan Kemuhammadiyahan), dan AIK 4 (Islam dan Ilmu Pengetahuan)

Dengan dipilihnya jalan pendidikan sebagai ruang mengakomodasi kelompok minoritas, maka usaha muhammadiyah sanagt patut diapresiasi. Sebab pendidikan ruang berseminya ide-ide inklusif, sangat tepat untuk menumbuhkan berbagai pemikiran yang terbuka, strategi bina damai, dan pemahaman modernitas keagamaan (Galung, 1969 dan reardon)

Dalam praktik kehidupan beragama, sesungguhnya para pemimpin organisasi terbesar di Indonesia, seperti Nahdhatul‘Ulama dan Muhammadiyah, senantiasa berkampanye tentang pentingnya Islam yang cinta damai. Terlepas dari perbedaan strategi dalam rangka melaksanakan “deradikalisasi”, antara Said Agil Siradj dan Din Syamsuddin, telah bekerja keras secara bersama-sama untuk membangun masyarakat Islam Indonesia yang jauh dari sentimen ideologi Islam.

KEBERAGAMAN DI DALAM UMAT ISLAM

Semenjak awal berdirinya Muhammadiyah, selalu berhadapan dengan realitas keagamaan yang kompleks sehingga akan dapat mempengaruhi Visi dan Misi Muhammadiyah di masa mendatang. Menurut Syamsul Arifin (2000: 74). Kemudian bukan hanya Muhammadiyah, Indonesia pada pasca reformasi 1998 makin dihadapkan pada dinamika internal umat islam yang luar biasa. Pada era ini banyak bermunculan organisasi islam baru, bentuknya malah banyak yang bercorak kelompk selain organisasi formal. Dalam kelahiran kelompok-kelompok yang baru disertau juga kemunculah paham-paham keilaman yang sangat bergam. Dengan demikian penggolonagn dan pengelompokan Umat Isalm di Indonesia semakin luas dan frekmentasinya kian beragam.

Kemajemukan dan keberagaman umat islam semakin tidak dapat dihindari. Karena mengingat umat islam di indonesia

tidaklah homogen dan malah sangat heterogen dari yang paling konservatis dingga progresif dari yang moderat hingga yang ekstim kiri maupun kanan. Umat islam indonesia sejak lahirnya organisais-organisasi yang membawa nama islam ini tidak lepas dari konflik atar paham keagamaan. Bahkan perpecahan di dalam internal organisasinya sekalipun selalu ada perbedann dan konflik. Seperti buku Pradana Boy ZTf yang berjudul "*membela islam murni"*(Suara Muhammadiyah, 2017) menelisik sudut pandang keislaman kader muhammadiyah, dari yang paling konservatif hingga paling progresif, dari yang paling moderat hingga yang paling ekstim semuanya lengkap ada di Muhammadiyah.

Dalam hal Kebhinekaan atau keberagaman di dalam tubuh *internal* umat islam, Muhammadiyah setidaknya akan menghadipi beberapa persoalan, diantaranya yaitu: Wacan Purifikasi Islam, Wacana Partai Politik Islam. Dalam hal purifikasi Islam: *pertama*, Muhammadiyah dihadapkan kepada realitas berbagai paham dan praktik keberagaman masyarakat islam di indonesia yang sering mencampur baurkan antara budaya islam dengan budaya nenek moyang yang ada sebelum kedatangan Isalsm di Indonesia. maenurut Syamsul Arifin (2000: 74) Bahwa faktor jarak Indonesia dengan Timur Tengah (Sebagai sumber Islam yang Autentik) berpengaruh besar terhadap autentikasi Paham keislaman.

Kemudian Clifort Geertz salah seorang antropolog yang sering mengkaji masyarakat islam di Indonesia menemukan kesenjangan prilaku umat islam di jawa sebagai hasil darinya adanya "faktor jarak" yang kemudian membagi masyarakat isalam di indonesia menjaadi tiga varian. Yaitu abangan, priyayi dan santri. Kemudian menurut Greetz kesenajangan tersebut bisa berupa nominal antara corak santri, priyayi maupun abangan. Sehingga kemudian ia menyebut keislaman jawa bercorak "nominalis"

Melihat venomena keberagaman faham dan adanya pencamburbauran antara ajaran islam dengan ajaran nenek moyang (yang merusak) maka yang dilakukan oleh Ahmad dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah melakukan purifikasi ajaran islam merupakan langkah yang sangat bijaksana. Menurut pandangan Muhammadiyah bahwa praktik keberagaman umat islam harus merefleksikan autentisitas dari Al Quran dan As Sunah. Cara muhammadiyah ini dapat dikatakan berhasil dengan bukti adanya penyebarluasan faham muhammadiyah di berbagai wilayah di indonesia.

Kemudian Persoalan kedua, Muhammadiyah akan berbenturan dengan benturan dengan penetrasi kalangan Misionaris dan gerakan liberalisme yang mendapatkan dukungan Kuat dari penguasa di negara lain. Dalam penetrasi kalangan Nasrani dapat dilihat dalam Desertasi doktor Alwi Shihab "Membendung arus: respon gerakan muhammadiyah terhadap penetrasi misi kristen di indonesia (miza, 1998) yang dituliskan bahwa setidaknya ada dua hal yang menarik" pertama adalah pendirian muhammadiyah yang tidak hanya ditujukan sebagai gerakan purifikasi ajaran islam tetapi juga membendung misi misionaris kristen untuk menyebarkan agamanya.

Hal menarik kedua adalah dalam membendung kristenisasi, pada masa Ahmad dahlan muhammadiyah dengan mendobrak tradisi islam tradisionalis dengan pembaharuan di dunia pendidikan mendirikan sekolahan dengan konsep modern seperti yang dilakukan kalangan kristen yang selain memberikan mata pelajaran umum juga memberikan mata pelajaran agama. Berbeda dengan pendidikan sekolah islam tradisionalis saat itu yang menekankan kepada konservatisme mereka dan cenderung mengabaikan pembaharuan yang modern.

Kemudian berhadapanya Muhammadiyah terhadap gerakna sekuler

dan liberal. Virus liberal ini nampaknya sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan bangsa indonesia, baik dari segi agama, sosial, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Menurut Din Smasudin seperti yang dikutip oleh pwmu.com (https://pwmu.co/4457/04/14/din-liberalisasi-tantangan-muhammadiyah-hari-ini/) misalkan saja dalam bidang ekonomi liberalisasi dapat dilihat dengan semakin merebahnya kapitalisme dalam sektor ekonomi. Kemudian dalam contoh lain liberalisasi dalam kebudayaan, melalui siaran Televisi maupun dunia perfileman masyarakat indonesia khususnya kaum milenial digiring untuk mengikuti trend perubahan kebudayaan.

Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting sekali dalam membendung arus liberalisasi. Seperti desertasi Alwi Sihab yang telah dijelaskan di atas bahwa Muhammadiyah lebih memilik jalan Kompetitif daripada jalur konfrontasi. Dalam rangka membendung arus liberalisme dalam bidang ekonomi muhammadiyah mendirikan sentra perekonomian yang berlandaskan pada nilai-nilai isalam seperti adanya bank syariah yang dinilai lebih islami daripada bank konvensional yang dinilai sangat liberatif dengan menerapkan suku bhunga yang kadang kala membebani orang tanpa disadari. Gerakan Belanja di warung tetangga yang merupakan propaganda dari LHKP PWM DIY merupakan contoh salah satu langkah yang sangat bijaksana dalam membendung arus liberalisme dunia ekonomi, gerakan ini muncul akibat kegelisahan dari maraknya sentra ekonomi kapitalis milik golongan kongloreat sehingga menggerus perekonomian warga.

Kedua persoalan sosial keagamaan diatas muaranya adalah toleransi terutama yang bercorak keagamaan. Secara internal Muhammadiyah berhadapan dengan kelompok tradisionalis yang masih memegang kebudayaan leluruh (yang merusak nilai-nilai Islam) sehingga diperlukanya purifikasi ajaran islam dan di

sisi eksternal muhammadiyah berhadapan dengan kristenisasi dan liberalisasi berbagai aspek kehidupan.

Keberhasilan Muhammadiyah dalam menghadapi dua persoalan diatas kerap memunculkan pujian dari berbagai kalangan. Dua diantaranya adalah james peacok dan mark. R woodward yang menganggap bahwa muhammadiyah memiliki gerakan dengan daya tahan dinamika puritan ndalam menegakkan islam yang kuat. Namun komentar terkait kondisi muhammadiyah dan kondisi umat islam indonesia khusunya muncul dari kuntowijoyo yang mengatakan bahwa muhammdiyah dan organisasi islam lainya mengidap penyakit " idiocracy" atau kekuasaan ciri khas sehingga terlihat sangat kaku.

Kuntowijoyo memberikan contoh di dalam tubuh muhammadiyah khusunya dan Umat islam seluruhnya terdapat penyakit kultural yang sekan mendarah daging dan tidak bisa hilang, seperti adanya alergisitas warga muhammadiyah dan Masyarakat muslim terhadap corak budaya organisasi lain hanya karena corak tradisi dan kebudayaan tersebut bukan miliknya. Selain itu umat islam di indonesia dapat dikategorikan mengidap penyakit yang di dalam sosiologi dinamai "labeling". Penyakit labeling ini sangat berbahaya karena di dalam interaksi antar umat beragama, penyakit "labeling" tersebut merupakan satu sumber konflik yang nyata,

Konsekuensinya penyakit "labeling" ini akan menganggap tradisin dari kelompok lain sebagai sebuah penyimpangan yang oleh warga Muhammadiyah disebut sebagai "bidah. Bisa jadi ketegangan antara Warga Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama yang dianggap masih menerapkan tradisi nenek moyang serta organisasi islam lainya terjadi akibat labelisasi dan justifikasi sepihak. (arifin, 2000: 76).

Kecenderungan umat bergama termasuk umat islam didalamnya sudah barang tentu akan menyatakan kebenaran

masing-masing yang kadangkala berbeda-beda, yang oleh Amin Abdullah (2000" 60) disebut sebagai sebuah "Klaim Kebenaran". Jika kemudian kita hendak merujuk kepad Al quran "klaim kebenaran" dari masing-masing pihak ini telah dijelaskan di dalam al quran QS AL-Baqarah: 111 Yang berbunyi.

> *"Orang-orang yahudi berkata: orang-orang kristen tidak berdiri diatas kebenaran, dan orang-orang kristenpun berkata 'orang yahudi tidak berdiri diatas kebenaran', sedang kedua pihak membaca sudat yang sama" (QS. AL.B aqarah: 111)*
> *"Mereka berkata"tidak ada yang masuk ke surga kecuali orang-orang yahudi atau kristen' yang demikian itulah agama-agama mereka. (QS.Al Baqarah: 111)*
> *"Orang-orang yahudi dan kristen tidak pernah menyukai engkau (wahai muhammad) kecuali jika engkaumengikuti agama mereka katakanlah (kepada mereka) "yang merupakan petunjuk adalah petunjuk dari Allah (bukan dari orang-orang yahudi atau kristen)*
> *"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidak akan diterima (agama itu) dari padanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi." (QS. Ali-Imran: 85)*

Muhammadiyah secara organisatoris memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam merawat ukuwah islamiyah. Hal ini dapat dilihat dari surat pernyataan dariPimpinanPusat Muhammadiyah nomor169/MLM/1.0/E/2015 Tentang Ukhuwah dan kemaslahatan Bersama mengisaratkan bahwa:

1. *"Islam mengajarkan sesama umat islam itu bersaudara (QS. Al Hujarat: 10) yang harus saling menjaga ukhuwah dan tidak boleh terpecah belah (QS. Ali-Imran). Di tubuh umat islam diakui adanya keberagaman paham pandangan keislaman maka penting untuk masing-masing pihak untuk bermuhasabah untuk senantiasa meluruskan keyakinan , paham dan pengmalan islam uamh berpijak kepada al-quran dan as-sunah yang maqbullah.*
2. *Dalam menyikapi perbedaan paham atau pandangan keislaman di tubuh umat islam maka diperlukan pendekatan dakwah dan mengedepankan hikmah, edukasi, dan dialok yang baik (QS. An-Nahl: 125) disertai sikap saling menasehati dengan benar dan sabar (QS. Al-Asr 1-3). Penting dikembangkan sikap saling bertolerasnis (tasamuh) dan menghargai keberagaman (tanawu') yang membawa kemaslahatan. Sebaliknya dihindari atau dijauhi sikap saling mengkafirkan yang dapat mempertajam perbedaan, konflik, dan permusuhan dan muaranya merugikan umat islam sendiri.*
3. *Berkaitan dengan konflik politik di yaman membawa muatan ketegangan isu suni dan syiah*

dengan segala kaitanya maupun dengan perbedaan paham di dalamnya, Muhammadiyahbmengajak semua pihak untuk saling menahan diri dan tidak melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip ukuwah islamiah serta dapat merugikan kepentingan umat islam dan bangsa secara keseluruhan.

4. *Muhammadiyah dengan dasar pandangan islam yang merujuk pada al quran dan sunnah nabi yang maqbulah, tidak menyetujui paham yang menyimpang dari prinsip-prinsip akidah yang selama ini menjadi pandangan yang muktabarah di tubuh umat islam. Namun demikian, muhammadiyah tidak menyetujui segala bentuk pandangan dan tindakan yang mengandung muatan kekerasan serta permusuhan yang pada akhirnya islam dan umat islam sendiri.*
5. *Khususu bagi warga muhammadiyah dan institusi di seluruh tingkatan dan lingkungan agar memberikan uswah hasanah dalam mengembangkan ukuwah ditengah keragaman pandangan dan paham keislaman. Sebaliknya, tidak membawa isu atau kegiatan yang dapat menimbulkan suasana perpecahan dan konflik di tubuh umat islam pada umumnya dan internal persyarikatan pada khusunya. Disamping itu, agar tetap fokus dalam upaya meningkatkan kualitas di berbagai bidang gerakan muhammadiyah.*

WACANA INDONESIA

BERKEMAJUAN

Dalam konteks bangsa dan negara "Indonesia Berkemajuan" mengandung substansi dan senapas dengan cita-cita nasional yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Dalam tafsir muhammadiyah sebagaimana dirumuskan dalam buku Revitalisasi Visi dan Karakter bangsa (2009) cita cita nasional Indoneisa tersebut diformulasikan dalam kalimat "negara indonbesia yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat" Indonesia yang berkemajuan juga sejalan dengan semangat "memajukan" kesejahteraan umum baik kesejahteraan yang bersifat jasmani maupun rohani, fisik maupun non fisik. Kata Indonesia berkemajuan mengandung arti Indonesia dapat menjadi maju, ingin menjadi maju sekaligus "berbuat atau bekerja menjadi maju". Indonesia yang maju atau berkembang karena sifatnya yang ideal merupakan proses yang tiada akhir, sehingga tujuan atau cita cita tersebut

harus terus dilakukan dari satu generasi ke generasi selanjutnya sampai akhir zaman. Karena, kata "Berkemajuan" merupakan proses sekaligus tujuan.

Indonesia Berkemajuan dalam konteks pemikiran Muhammadiyah senapas dengan isu sentral muhammadiyah tentang "Isalm Berkemajuan" sebagai pandangan keislaman Muhammadiyah yang telah dinyatakan dalam "Pemikiran Muhammadiyah Abad kedua" hasil muktamar ke 46 di Yogyakarta tahun 2010. Ikon "berkemajuan" selain senafas dengan spirit komitmen dan cita-cita Muhammadiyah sebagai gerakan islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid sepanjang perjalanan sejarahnya dan sudah dibuktikan dalam langkah nyata gerakanya, juga sejalan dengan cita-cita universal setiap bangsa dan negara di manapun . Semua negara dan bangsa mencita-citakan kemajuan, dan semua hal atau aspek sepeti keadilan, kesejahteraan, kmakmuran dan kata-kata yang sejenis lainya sesungguhnya menuju pada keadaan yang lenbih baik dan dapat di bingkai secara umum dan substantif dengan istilah kemajuan. (Suara Muhammadiyahedisi no 20 th ke 98 16-30 november 2013: 6)

Dalam konteks realitas berbangsa dan bernegara saat ini "kemajuan"dan "mencerdaskan" sangat relevan dan menjadi suatu keniscayaan. Indoensia setelah 68 tahun merdeka masih tertinggal dalam sejumlah aspek kehidupan. Di bandingkan dengan negara-negara tetangga terutama singapura, malaysia, thailand. Pada saat yang sama masih terdapat realitas ketradisionalan, keterbelakangan, kebodohan, pembodohan, irrasionalitas dan sejenisnya baik dalam kehidupan berbangsa maupun dalam mengurus negara. (Suara Muhammadiyahedisi no 20 th ke 98 16-30 november 2013: 6)

Negara sebagai fenomena modern masih banyak di konstruksi dan diurus dengan cara-cara yang tradisional, sehingga menyebabkan salah aruskorupsi, penyalah gunaan, penyelewengan, dan

bentuk bentuk ketertinggalan . negara dan bangsa tidak di urus dan dikelola dengan mentalitas kebhinekaan dan langkah-langkah yang cerdas dan berkemajuan, sehingga indonesia masih jaubh dari kata cerdas dan maju dalam segala aspek kehdiuapabn sebagaimana layaknya negara dan bangsa maju.

Di Syamsudin dalam (Suara Muhammadiyahedisi no 20 th ke 98 16-30 november 2013: 6) Menyatakan bahwa ada hubungan yang sangat harmonis antara "Islam berkemajuan" dengan "Indonesia Berkemajuan" hal tersebut dapat dilihat pada tahun 1990 dan 1912 KH Ahmad dahlan menggagas konsep berkemajuan dari sudut pandang keislaman. Karena muhammadiyah memiliki konsep Islam Berkemajuan dan bertempat di Indonesia maka Indonesia haruslah berkemajuan. Maka kemudian Muhammadiyah menurut din ingin mensinkronkan Islam berkemajuan dengan Indoensia Berkemajuan.

Muhammadiyah melalui Haedar Nashir memberikan 6 rekomendasi nawacita jika Presiden Jokowi kembali terpilih menjadi presiden pada kontestasi pemilu 2019, isi 6 rekomendasi nawa cita adalah; *Pertama,* jadikan nilai agama yang hidup di bangsa ini sebagai nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, sebagai wujud sila Ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua,* menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofi, alam pikir seluruh bangsa dan negara. Sehingga Pancasila betul-betul terwujud. *Ketiga,* adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial. *Keempat,* mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara. *Kelima,* restrukturisasi pendidikan nasional. *Keenam,* proaktif pemerintah untuk dunia Islam.

Dalam penyampaian nawa cita oleh Haedar Nashir ketika mengunjungi Istana Presiden dapat disimpulkan bahwa ada dukungan dan harapan Muhammadiyah untuk presiden jokowi dalam berkontestasi

dalam pemilihan umum tahun 2019, selain itu. Muhammadiyah era Presiden Joko Widodo lebih terbuka dan lebih menerima kepemimpinan era presiden jokowi ketimbang era SBY ketika muhammadiyah dipimpin Din Syamsudin, hal ini terbukti dengan betapa dekatnya beberapa tokoh Muhammadiyah dengan Jokowi seperti Ahmad Syafii Maarif, Din Syamsudin yang diangakat menjadi utusan kusus presiden dalam dialok antar agama dan peradaban.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian diskursif/wacana ini dapat diberikan beberapa kesimpulan antara lain. Pertama, kontribusi Muhammadiyah terkait wacana pancasila dan nasionalisme cukup jelas dari perjalanan sejarahnya dari sejak pendirian Muhammadiyah yang mempunyai nilai sama dengan Budi Utomo terkait upaya pembangunan bangsa yaitu melalui pendidikan. Dari pendidikan Muhammadiyah nilai keislaman dan keindonesian sama-sama dijaga dan perkuat. Jelaslah persyarikatan Muhammadiyah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam merawat sistem berbangsa dan bernegara indonesia yang diletakkan diatas sistem pancasila, terbukti dari beberapa produk pemikiran Muhammadiyah yang telah disistimatisasikan selama lima tahun terakhir ini seperti halnya gagasan "Negara Pancasila" sebagai *darul ahdi wasy-syahadah*, Indonesia Berkemajuan, Islam Berkemajuan dan beberapa matan keyakinan Muhammadiyah seperti Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah yang didalamnya terdapat panduan dalam berbangsa dan bernegara yang tentunya menjadi bukti komitmenya Muhammadiyah untuk terus mengawal pembangunan dan ideology negara Indonesia.

Kedua, penerimaan pancasila sebagai ideologi Negara memang harus diakui terdapat spectrum yang beragam.

Hal ini bisa ditunjukkan dari pandangan dan pemikiran elit dan kader muhammadiyah kerap kali berbeda karena Muhammadiyah dibangun diatas sistem kolektif-kolegial yang mana semuanya memiliki suara dan hak yang sama untuk menentukan arus jalanya organisasi Muhammadiyah. Ada tradisi otonomi dan wacana yang sangat kuat di dalam persyarikatan Muhammadiyah terutama dalam sikap politik dan hubungannya dengan rezim pemerintahan. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa para elit Muhammadiyah tingkat pusat sudah sependapat dengan pancasila. Namun, tidak bisa dinafikan bahwa kader-kader Muhammadiyah memiliki berbagai varian pemikiran yang bisa dipastikan tidak tunggal apalagi berhadapan dengan rezim kekuasaan yang berubah-ubah relasinya terhadap Islam dan masyarakat sipil islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulgani, R. (1998). Pancasila Perjalanan Sebuah Ideologi. LP3ES

Asrori, A. (2017). *Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas*. *KALAM*, *9*(2), 253-268.

Astim Riyanto, S. H. (2016) .*Revitalisasi Penerapan Pancasia Dalam Kehidupan Bangsa dan Multi Religi. Yogyakarta*

Maarif, A. S., & Abdurrahman, M. (2006). *Islam dan Pancasila sebagai dasar negara: studi tentang perdebatan dalam konstituante*. Pustaka LP3ES Indonesia.

Imron, R. (2000). *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*. Tiara Wacana Yogya.

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Nashir. H, 2010, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta.

Notonagoro, (1967), *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila*, Pantjuran Tujuh, Jakrata.

Moleong, L. J. (2007). Qualitative research methodology. *Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Year*.

Nashir. H, 2006, Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah, UMM, Malang.

PP muhammadiyah. (2005) Berita Resmi Muhammadiyah*: Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang*. PP muhammadiyah, Yogyakarta

Sastrapratedja, M. (1990). Konsep Kualitas dan Martabat Manusia: Pandangan Budayawan dan Masyarakat. *Kongres VI Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), 6-12 Juli, Yogyakarta*.

Sastrapratedja, M., Riberu, J., & Parera, F. M. (1986). *Menguak mitos-mitos pembangunan: telaah etis dan kritis*. Gramedia.

Shihab, A., & Inklusif, I. (1999). Menuju Terbuka dalam beragama. *Bandung: Mizan*.

Storey, J. (2018). *Cultural theory and popular culture: An introduction*. Routledge.

Sutrisno, S., & Hardjono, D. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Penerbit Andi.

Tibi, B., Rosyidi, I., Abas, Z., & Carolina, S. (2000). *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*. Tiara Wacana Yogya.

Titus, Smith & Nolan, 1984, *Persoalanpersoalan Filsafat*, Terjemahan : Rosyidi, Bulan Bintang, Jakarta

Ulhaq. F. D, 2017, *Membela Islam Membela Kemanusiaan*, Mizan, Jakarta.

Wibisono Koento, 1996, *Hubungan, Filsafat Pancasila dengan Ideologi*, *Sarasehan Dosendosen Pancasila dan Dosen Pancasila se-DIY.*, BP-7 DIY., **Yogyakarta.**

Jurnal

Al-Hamdi, R. (2012). Dinamika islam dan Politik Elit-Elit Muhammadiyah Periode 1998-2010. *Jurnal Studi Pemerintahan: Journal of Government and Politics*, *3*(1).

Darmodiharjo, D., Kansil, C. S. T., & Dekker, N. (1978). *Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dilengkapi dengan ketetapan-ketetapan MPR tahun 1978*. Humas Universitas Brawijjaya.

Hidayat, S. (2016). *Negara Pancasila Sebagai Daruk 'Ahdi Wasy Syahadah Wawasan dan Kontribusi Muhammadiyah Bagi NKRI*. *Tajdid*, *14*(1), 12-17.

Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, *1*(1), 123-152.

Lestari, G. (2016). Bhinnekha Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *28*(1).

Ma'arif, B. S. (2010). Dari "Ekstrem Kanan" ke Terorisme. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *26*(2), 169-181.

Nugroho, A. (2013). Wacana Islam dan Negara Era Pra-Kemerdekaan: Pergulatan Ideologis Kelompok Islam dan Nasionalis Sekuler. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, *9*(2), 129-147.

Oesman, O. (1991). *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*. BP-7 Pusat.

Rosyidi., I. (2000). Islamization of Knowledge: A Comparative Analysis of the Conceptions of AI-Attas and AI-Fariiqi. *Intellectual Discourse*,

Septiningsih, E. M., Ignacio, J. C. I., Sendon, P. M., Sanchez, D. L., Ismail, A. M., & Mackill, D. J. (2013). QTL mapping and confirmation for tolerance of anaerobic conditions during germination derived from the rice landrace Ma-Zhan Red. *Theoretical and Applied Genetics*, *126*(5), 1357-1366.

Suparlan, P. (2014). *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?*. *Antropologi Indonesia*.

Suryana, T. (2011). Konsep dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*,

Widowaty, Y. (2017). *Menggali Kembali Peran Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara Dalam Pembangunan Nasional di Era Globalisasi*. Yogyakarta.

Dokumen dan Majalah

Booklet Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan ,(2016) Yogyakarta, UMY

Majalah Tablihj Edisi 4 Mei 2016,

Matan Edisi 137, Desember 2017.

Suara Muhammadiyah edisi no.24 Th ke 105.

Suara Muhammadiyah edisi 21, Th KE 102, November 2017

Suara Muhammadiyah Edisi 01 Th ke 103, Januari 2018

Suara Muhammadiyah Edisi 17 TH ke 101, September 2016.

Website dan Situs Online

Http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/14/noclta-amien-rais-ajak-warga-muhammadiyah-berjihad, Diakses pada pukul 16:40, 4 Desember 2017.

http://www.panjimas.com/news/2017/08/08/inilah-sikap-kebangsaan-pp-muhammadiyah-terhadap-pancasila/, Diakses pada pukul 22:10, 4 Desember 2017.

http://www.muhammadqorib.com/2015/12/muhammadiyah-dan-gerakan-wasathiyah.html, Diakses pada pukul 14:30, 5 Desember 2017.

http://www.muhammadiyah.or.id/id/news-14517-detail-menjadikan-pancasila-sebagai-jalan-tengah-membangun-peradaban.html, Diakses pada pukul 10:50, 9 Desember 2017.

http://www.umy.ac.id/agama-dan-pancasila-sama-sekali-tidak-bertentangan.html